

## PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KESIAPSIAGAAN BENCANA PADA DESTINASI WISATA AIR HITAM DI KOTA PALANGKA RAYA

Desy Selawaty<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

Email: desyselawaty@umpr.ac.id

### ABSTRAK

Destinasi Wisata Air Hitam Kota Palangka Raya merupakan kawasan wisata berbasis alam yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap berbagai potensi bencana, seperti kebakaran hutan dan lahan, banjir, serta kecelakaan wisata air. Kondisi tersebut menuntut adanya kebijakan kesiapsiagaan bencana yang terintegrasi dalam pengelolaan pariwisata. Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mengimplementasikan kebijakan kesiapsiagaan bencana guna menjamin keselamatan wisatawan dan keberlanjutan destinasi wisata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah daerah dalam implementasi kebijakan kesiapsiagaan bencana pada Destinasi Wisata Air Hitam Kota Palangka Raya, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, studi dokumentasi, dan kuesioner pendukung kepada anggota Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Air Hitam. Analisis data dilakukan dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah berperan sebagai regulator, fasilitator, dan koordinator dalam implementasi kebijakan kesiapsiagaan bencana. Peran fasilitatif pemerintah daerah melalui pelatihan, simulasi, dan penyediaan sarana keselamatan terbukti meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran Pokdarwis terhadap risiko bencana. Namun demikian, implementasi kebijakan masih menghadapi kendala berupa keterbatasan regulasi teknis, belum optimalnya koordinasi lintas sektor yang berkelanjutan, serta keterbatasan sumber daya.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan kesiapsiagaan bencana pada Destinasi Wisata Air Hitam telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kapasitas dan kesiapsiagaan Pokdarwis, namun masih memerlukan penguatan regulasi, koordinasi, dan keberlanjutan program. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan pengelolaan destinasi wisata yang aman, tangguh, dan berkelanjutan.

**Kata kunci:** kebijakan publik, kesiapsiagaan bencana, peran pemerintah daerah, kelompok sadar wisata, pariwisata berbasis masyarakat

### ABSTRACT

The Black Water Tourism Destination in Palangka Raya City is a nature-based tourist area that is highly vulnerable to various potential disasters, such as forest and land fires, floods, and water tourism accidents. These conditions require integrated disaster preparedness policies in tourism management. Local governments have a strategic role in implementing disaster preparedness policies to ensure tourist safety and the sustainability of tourist destinations. This study aims to analyze the role of local governments in implementing disaster preparedness policies at the Air Hitam Tourism Destination in Palangka Raya City, as well as to identify the supporting and inhibiting factors in its implementation.

This study uses a descriptive qualitative approach with data collection through in-depth interviews, field observations, documentation studies, and supporting questionnaires to members of the Air Hitam Tourism Awareness Group (Pokdarwis). Data analysis was carried out in stages of data reduction, data presentation,

and conclusion drawing. The results of the study show that the local government plays a role as a regulator, facilitator, and coordinator in the implementation of disaster preparedness policies. The facilitative role of the local government through training, simulations, and the provision of safety facilities has been proven to increase the knowledge, skills, and awareness of Pokdarwis regarding disaster risks. However, the implementation of policies still faces obstacles in the form of limited technical regulations, suboptimal continuous cross-sector coordination, and limited resources.

This study concludes that the implementation of disaster preparedness policies at the Air Hitam Tourist Destination has had a positive impact on increasing the capacity and preparedness of Pokdarwis, but still requires strengthening of regulations, coordination, and program sustainability. The results of this study are expected to serve as a reference for local governments in formulating and implementing policies for the management of safe, resilient, and sustainable tourism destinations.

**Keywords:** public policy, disaster preparedness, role of local government, tourism awareness groups, community-based tourism

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pariwisata merupakan sektor strategis dalam pembangunan daerah karena mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, pengembangan pariwisata tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan dimensi sosial, budaya, dan lingkungan. Salah satu pendekatan yang banyak diterapkan adalah pariwisata berbasis masyarakat (community-based tourism), yang menempatkan masyarakat lokal sebagai aktor utama dalam pengelolaan destinasi wisata.

Kawasan Wisata Air Hitam di Kota Palangka Raya merupakan salah satu destinasi wisata berbasis alam yang dikelola dengan melibatkan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Destinasi ini memiliki daya tarik utama berupa ekosistem perairan dan kawasan gambut yang khas. Namun demikian, karakteristik wilayah tersebut juga menyimpan potensi risiko bencana yang cukup tinggi, seperti kebakaran hutan dan lahan, banjir, cuaca ekstrem, serta kecelakaan wisata air. Risiko-risiko tersebut dapat berdampak langsung terhadap keselamatan wisatawan, masyarakat sekitar, serta keberlanjutan destinasi wisata itu sendiri.

Dalam kerangka kebijakan publik, pemerintah daerah memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa pengelolaan destinasi wisata dilakukan secara aman dan berkelanjutan. Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam perumusan kebijakan, penyediaan regulasi, fasilitasi sumber daya, serta koordinasi lintas sektor dalam upaya

pengurangan risiko bencana. Kebijakan kesiapsiagaan bencana menjadi bagian penting dalam pengelolaan pariwisata, khususnya pada destinasi wisata berbasis alam yang memiliki tingkat kerentanan tinggi.

Meskipun berbagai kebijakan terkait kebencanaan dan pariwisata telah dikeluarkan oleh pemerintah, implementasi kebijakan di tingkat lokal sering kali menghadapi berbagai tantangan. Keterbatasan anggaran, lemahnya koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD), serta rendahnya kapasitas kelompok pengelola wisata menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan kesiapsiagaan bencana. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana peran pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kebijakan kesiapsiagaan bencana pada Destinasi Wisata Air Hitam Kota Palangka Raya.

Penelitian ini menjadi relevan dan penting karena memberikan gambaran empiris mengenai praktik implementasi kebijakan kesiapsiagaan bencana di sektor pariwisata, sekaligus mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi pemerintah daerah dalam menjalankan perannya.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam implementasi kebijakan kesiapsiagaan bencana pada Destinasi Wisata Air Hitam Kota Palangka Raya?
2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan kesiapsiagaan bencana pada destinasi wisata tersebut?
3. Bagaimana dampak implementasi kebijakan kesiapsiagaan bencana terhadap pengelolaan Destinasi Wisata Air Hitam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis peran pemerintah daerah dalam implementasi kebijakan kesiapsiagaan bencana pada Destinasi Wisata Air Hitam Kota Palangka Raya.
2. Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan kesiapsiagaan bencana.

3. Menilai dampak implementasi kebijakan kesiapsiagaan bencana terhadap kesiapan pengelolaan destinasi wisata.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoretis**

Memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian kebijakan publik, khususnya terkait implementasi kebijakan kesiapsiagaan bencana pada sektor pariwisata berbasis masyarakat.

##### **2. Manfaat Praktis**

Menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan pengelolaan destinasi wisata yang aman bencana.

#### **TINJAUAN PUSTAKA**

##### **A. Kebijakan Publik dan Implementasi Kebijakan**

Kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan publik. Implementasi kebijakan menjadi tahap krusial karena menentukan sejauh mana tujuan kebijakan dapat tercapai. Model implementasi kebijakan menekankan pentingnya aktor pelaksana, sumber daya, komunikasi kebijakan, serta kondisi lingkungan (Dunn, 2018).

##### **B. Kesiapsiagaan Bencana**

Kesiapsiagaan bencana merupakan upaya sistematis yang dilakukan untuk mengantisipasi, merespons, dan meminimalkan dampak bencana. Dalam konteks pariwisata, kesiapsiagaan bencana mencakup penyediaan sarana keselamatan, penyusunan SOP, pelatihan sumber daya manusia, serta sistem koordinasi tanggap darurat.

##### **C. Peran Pemerintah Daerah**

Pemerintah daerah memiliki peran sebagai regulator, fasilitator, koordinator, dan pengawas dalam implementasi kebijakan kesiapsiagaan bencana. Peran tersebut diwujudkan melalui penyusunan regulasi, penyediaan anggaran, pembinaan Pokdarwis, serta koordinasi lintas sektor.

#### **METODE PENELITIAN**

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan fokus pada analisis implementasi kebijakan.

#### B. Lokasi dan Subjek Penelitian

Lokasi penelitian berada di Destinasi Wisata Air Hitam Kota Palangka Raya. Subjek penelitian meliputi OPD terkait, BPBD, Dinas Pariwisata, dan Pokdarwis Air Hitam.

#### C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara mendalam
2. Observasi lapangan
3. Studi dokumentasi

#### D. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi dan Subjek Penelitian

Destinasi Wisata Air Hitam merupakan salah satu kawasan wisata berbasis alam di Kota Palangka Raya yang dikelola oleh Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Air Hitam dengan pendampingan dari Pemerintah Daerah melalui Dinas Pariwisata dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Kawasan ini memiliki karakteristik wilayah perairan dan lahan gambut yang rentan terhadap berbagai jenis bencana, seperti kebakaran hutan dan lahan (karhutla), banjir musiman, serta kecelakaan wisata air.

Subjek penelitian meliputi:

1. Aparatur pemerintah daerah (Dinas Pariwisata dan BPBD Kota Palangka Raya);
2. Pengurus dan anggota Pokdarwis Air Hitam;
3. Pihak pendukung lainnya seperti kelurahan dan relawan kebencanaan.

Jumlah responden kuesioner sebanyak **30 orang anggota Pokdarwis**, sedangkan wawancara mendalam dilakukan kepada **6 informan kunci**, terdiri dari 2 aparatur pemerintah daerah dan 4 pengurus Pokdarwis.

#### B. Peran Pemerintah Daerah dalam Implementasi Kebijakan Kesiapsiagaan Bencana

##### a. Peran Pemerintah Daerah sebagai Regulator

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah berperan sebagai regulator melalui penyusunan dan sosialisasi kebijakan terkait kebencanaan dan pariwisata aman bencana. Kebijakan tersebut mengacu pada regulasi nasional dan daerah tentang penanggulangan bencana serta pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara, pemerintah daerah telah:

- Menyelaraskan kebijakan pariwisata daerah dengan kebijakan pengurangan risiko bencana;
- Mengarahkan Pokdarwis untuk menerapkan prinsip keselamatan wisata;
- Mendorong penyusunan prosedur operasional sederhana terkait penanganan keadaan darurat di kawasan wisata.

Namun, hasil observasi menunjukkan bahwa kebijakan tersebut belum sepenuhnya dituangkan dalam bentuk SOP tertulis yang spesifik untuk Destinasi Wisata Air Hitam, sehingga implementasinya masih bersifat fleksibel dan bergantung pada inisiatif pengelola wisata.

Gambar 2

Kegiatan bersama Dinas Pariwisata Kota Palangka Raya dan Pokdarwis Wisata Air Hitam Kota Palangka Raya



#### **b. Peran Pemerintah Daerah sebagai Fasilitator**

Sebagai fasilitator, pemerintah daerah memberikan dukungan berupa pelatihan, pendampingan, dan penyediaan sarana pendukung kesiapsiagaan bencana. Bentuk fasilitasi yang dilakukan antara lain:

- Pelatihan dasar kesiapsiagaan bencana;
- Simulasi evakuasi dan penanganan kecelakaan wisata air;
- Penyediaan alat keselamatan.

Berdasarkan data dokumentasi kegiatan, alat keselamatan yang difasilitasi meliputi:

- Life jacket (rompi pelampung);
- Ring buoy (pelampung penyelamat);
- Alat Pemadam Api Ringan (APAR);
- Pompa air untuk penanganan kebakaran awal.

Hasil kuesioner menunjukkan peningkatan pemahaman anggota Pokdarwis terhadap fungsi alat keselamatan, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4.1.

**Tabel 4.1 Tingkat Pemahaman Anggota Pokdarwis terhadap Alat Keselamatan**

Kategori Pemahaman	Sebelum Program (%)	Sesudah Program (%)
Sangat Paham	10	45
Paham	25	40
Cukup Paham	40	15
Kurang Paham	25	0

Data tersebut menunjukkan adanya peningkatan signifikan pemahaman anggota Pokdarwis setelah adanya fasilitasi dari pemerintah daerah.

#### **c. Peran Pemerintah Daerah sebagai Koordinator**

Peran koordinatif pemerintah daerah terlihat melalui sinergi antara Dinas Pariwisata, BPBD, kelurahan, dan Pokdarwis. Koordinasi dilakukan dalam bentuk:

- Pelibatan BPBD dalam pelatihan kebencanaan
- Penyampaian informasi potensi risiko bencana;
- Penanganan awal kejadian darurat di kawasan wisata.

#### **Gambar 2**

Penyampaian Informasi tentang mitigasi bencana oleh BPBD Kota Palangka Raya



Meskipun koordinasi telah berjalan, hasil wawancara menunjukkan bahwa koordinasi lintas sektor masih bersifat insidental, terutama saat terjadi kegiatan atau potensi ancaman bencana. Belum terdapat mekanisme koordinasi rutin dan terjadwal yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

#### d. Implementasi Kebijakan Kesiapsiagaan Bencana di Tingkat Pokdarwis

Implementasi kebijakan kesiapsiagaan bencana berdampak pada peningkatan pengetahuan dan sikap anggota Pokdarwis. Hasil kuesioner menunjukkan perubahan sikap yang cukup signifikan terkait kesadaran keselamatan wisata.

**Tabel 4.2 Perubahan Sikap Anggota Pokdarwis terhadap Kesiapsiagaan Bencana**

Indikator Sikap	Sebelum Program (%)	Sesudah Program (%)
Menganggap kesiapsiagaan sangat penting	30	70
Menganggap penting	40	25
Kurang menganggap penting	30	5

Perubahan ini menunjukkan bahwa kebijakan dan program pemerintah daerah berkontribusi dalam membangun kesadaran kolektif Pokdarwis terhadap pentingnya kesiapsiagaan bencana.

#### e. Peningkatan Kesiapsiagaan Operasional

Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa Pokdarwis telah:

- Menyediakan alat keselamatan di titik-titik strategis;
- Menetapkan pembagian peran sederhana dalam situasi darurat;
- Memberikan arahan keselamatan kepada wisatawan.



Namun demikian, belum seluruh anggota Pokdarwis terlibat aktif dalam simulasi kesiapsiagaan, sehingga kapasitas operasional masih perlu diperkuat secara merata.

### **C. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan**

#### **a. Faktor Pendukung**

1. Komitmen Pemerintah Daerah, terlihat dari keterlibatan OPD terkait dalam kegiatan pelatihan.
2. Partisipasi Aktif Pokdarwis, yang bersedia mengikuti pelatihan dan simulasi.
3. Dukungan Sarana Keselamatan, yang meningkatkan rasa aman dalam pengelolaan wisata.

#### **b. Faktor Penghambat**

1. Keterbatasan Anggaran, sehingga program belum dapat dilakukan secara rutin.
2. Belum Optimalnya SOP Tertulis, khususnya SOP kesiapsiagaan bencana wisata.
3. Koordinasi yang Belum Berkelanjutan, masih bergantung pada kegiatan tertentu.

### **E. Pembahasan**

Pembahasan ini difokuskan pada analisis mendalam terhadap peran pemerintah daerah dalam implementasi kebijakan kesiapsiagaan bencana pada Destinasi Wisata Air Hitam Kota Palangka Raya, dengan mengaitkan temuan empiris penelitian dan kerangka teori kebijakan publik, pengurangan risiko bencana, serta pariwisata berbasis masyarakat.

#### **a. Peran Pemerintah Daerah dalam Perspektif Implementasi Kebijakan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan kesiapsiagaan bencana pada Destinasi Wisata Air Hitam tidak dapat dilepaskan dari peran aktif pemerintah daerah sebagai aktor utama kebijakan. Dalam perspektif teori implementasi kebijakan, pemerintah daerah berfungsi sebagai pelaksana sekaligus pengendali kebijakan yang memastikan tujuan kebijakan dapat diterjemahkan ke dalam tindakan konkret di tingkat lokal (Dunn, 2018).

Peran pemerintah daerah sebagai regulator tercermin dalam upaya penyelarasan kebijakan pariwisata daerah dengan kebijakan kebencanaan. Meskipun belum seluruhnya diformalkan dalam regulasi teknis yang spesifik, arah kebijakan tersebut

telah memberikan legitimasi bagi Pokdarwis untuk mengintegrasikan aspek keselamatan dan kesiapsiagaan bencana dalam pengelolaan destinasi wisata. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi tertulis, tetapi juga oleh kejelasan arah kebijakan dan komitmen aktor pelaksana.

Namun demikian, ketiadaan standar operasional prosedur (SOP) kesiapsiagaan bencana yang tertulis dan terintegrasi khusus untuk Destinasi Wisata Air Hitam menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan dan praktik implementasi. Dalam konteks ini, kebijakan kesiapsiagaan bencana masih bersifat normatif dan belum sepenuhnya terinstitusionalisasi dalam tata kelola operasional destinasi wisata. Kondisi ini berpotensi menimbulkan inkonsistensi pelaksanaan di lapangan, terutama ketika terjadi pergantian pengurus atau peningkatan intensitas kunjungan wisatawan.

#### **b. Efektivitas Peran Fasilitatif Pemerintah Daerah dalam Membangun Kapasitas**

Temuan penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah sebagai fasilitator merupakan aspek yang paling menonjol dalam implementasi kebijakan kesiapsiagaan bencana. Melalui pelatihan, simulasi, dan penyediaan alat keselamatan, pemerintah daerah secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas individu dan kelembagaan Pokdarwis.

Data empiris menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pengetahuan dan keterampilan anggota Pokdarwis terkait penggunaan alat keselamatan dan prosedur penanganan keadaan darurat. Peningkatan ini mencerminkan efektivitas pendekatan peningkatan kapasitas berbasis komunitas, yang menekankan pembelajaran partisipatif dan pengalaman langsung. Hal ini sejalan dengan konsep *capacity building* yang menyatakan bahwa penguatan kapasitas tidak hanya berorientasi pada transfer pengetahuan, tetapi juga pada perubahan sikap dan perilaku pelaksanakebijakan.

Meskipun demikian, efektivitas peran fasilitatif pemerintah daerah masih menghadapi tantangan keberlanjutan. Pelatihan dan simulasi kesiapsiagaan bencana belum dilakukan secara rutin dan terjadwal, sehingga terdapat risiko menurunnya

kapasitas seiring waktu. Selain itu, belum meratanya partisipasi seluruh anggota Pokdarwis dalam kegiatan peningkatan kapasitas menunjukkan perlunya strategi fasilitasi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

**c. Koordinasi Lintas Sektor sebagai Tantangan Implementasi Kebijakan**

Dalam implementasi kebijakan kesiapsiagaan bencana, koordinasi lintas sektor menjadi faktor kunci yang menentukan keberhasilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berupaya membangun koordinasi antara Dinas Pariwisata, BPBD, pemerintah kelurahan, dan Pokdarwis. Koordinasi ini memungkinkan terjadinya pertukaran informasi, dukungan teknis, dan respons awal terhadap potensi bencana.

Namun demikian, koordinasi yang berlangsung masih bersifat insidental dan belum terlembaga secara sistematis. Ketiadaan forum koordinasi rutin dan mekanisme kerja sama formal menyebabkan implementasi kebijakan sangat bergantung pada inisiatif individu dan momentum kegiatan tertentu. Dalam perspektif governance, kondisi ini menunjukkan belum optimalnya tata kelola kolaboratif dalam pengelolaan destinasi wisata aman bencana.

Temuan ini sejalan dengan pandangan collaborative governance yang menekankan pentingnya struktur kelembagaan, kejelasan peran, dan komitmen jangka panjang antar pemangku kepentingan (Ansell & Gash, 2008). Tanpa adanya mekanisme koordinasi yang berkelanjutan, upaya kesiapsiagaan bencana berpotensi terfragmentasi dan kurang responsif terhadap dinamika risiko yang terus berkembang.

**d. Implikasi Kebijakan terhadap Kesiapsiagaan Pokdarwis**

Implementasi kebijakan kesiapsiagaan bencana yang didukung oleh peran pemerintah daerah memberikan dampak positif terhadap kesiapan Pokdarwis dalam mengelola destinasi wisata. Peningkatan kesadaran keselamatan wisata, kemampuan penggunaan alat keselamatan, serta pembagian peran dalam situasi darurat menunjukkan bahwa kebijakan telah memberikan perubahan nyata pada tingkat operasional.

Namun demikian, kesiapsiagaan yang terbentuk masih bersifat dasar dan belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem pengelolaan destinasi wisata. Hal ini terlihat dari belum adanya dokumen perencanaan risiko bencana, jalur evakuasi yang terstandarisasi, serta mekanisme evaluasi berkala terhadap kesiapsiagaan Pokdarwis. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan kesiapsiagaan bencana masih perlu diperkuat agar tidak berhenti pada peningkatan kapasitas individu, tetapi berkembang menjadi kesiapsiagaan kelembagaan yang berkelanjutan.

**e. Kesiapsiagaan Bencana sebagai Bagian dari Pariwisata Berkelanjutan**

Dalam konteks pariwisata berkelanjutan, kesiapsiagaan bencana merupakan prasyarat penting untuk menjamin keberlanjutan destinasi wisata. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa pengelolaan destinasi wisata berbasis masyarakat yang tidak disertai kesiapsiagaan bencana berpotensi menimbulkan risiko keselamatan dan merugikan citra pariwisata daerah.

Peran pemerintah daerah dalam mengintegrasikan kebijakan kesiapsiagaan bencana ke dalam tata kelola pariwisata menjadi kunci dalam mewujudkan pariwisata yang aman, tangguh, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, kebijakan kesiapsiagaan bencana perlu diposisikan tidak hanya sebagai kebijakan sektoral kebencanaan, tetapi sebagai bagian integral dari kebijakan pengembangan pariwisata daerah.

**f. Refleksi Teoretis dan Kontribusi Penelitian**

Secara teoretis, penelitian ini memperkuat argumen bahwa implementasi kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh kapasitas aktor pelaksana dan dukungan sistem kelembagaan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah sebagai fasilitator dan koordinator memiliki kontribusi signifikan terhadap keberhasilan implementasi kebijakan kesiapsiagaan bencana, meskipun masih diperlukan penguatan dalam aspek regulasi dan koordinasi berkelanjutan.

Penelitian ini juga memberikan kontribusi empiris dalam kajian kebijakan pariwisata dan kebencanaan, khususnya dalam konteks destinasi wisata berbasis masyarakat di daerah rawan bencana. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat

menjadi rujukan bagi pemerintah daerah lain dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan kesiapsiagaan bencana yang kontekstual dan partisipatif.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peran Pemerintah Daerah dalam Implementasi Kebijakan Kesiapsiagaan Bencana pada Destinasi Wisata Air Hitam Kota Palangka Raya, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan kesiapsiagaan bencana di sektor pariwisata berbasis masyarakat telah berjalan dan memberikan dampak positif, namun belum sepenuhnya optimal dan berkelanjutan.

Pertama, pemerintah daerah memiliki peran strategis sebagai regulator dalam mengarahkan pengelolaan destinasi wisata agar selaras dengan prinsip pengurangan risiko bencana. Arah kebijakan tersebut telah menjadi dasar bagi Pokdarwis dalam menerapkan aspek keselamatan wisata. Namun demikian, belum tersusunnya regulasi teknis dan standar operasional prosedur (SOP) kesiapsiagaan bencana yang spesifik untuk Destinasi Wisata Air Hitam menyebabkan implementasi kebijakan masih bersifat umum dan belum terinstitusionalisasi secara kuat di tingkat operasional.

Kedua, dalam perannya sebagai fasilitator, pemerintah daerah telah memberikan kontribusi nyata melalui pelaksanaan pelatihan kesiapsiagaan bencana, simulasi penanganan keadaan darurat, serta penyediaan sarana dan prasarana keselamatan wisata. Program-program tersebut terbukti mampu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran anggota Kelompok Sadar Wisata terhadap risiko bencana. Peningkatan kapasitas ini menunjukkan bahwa kebijakan kesiapsiagaan bencana yang diimplementasikan dengan pendekatan partisipatif dapat memperkuat kesiapan masyarakat lokal dalam mengelola destinasi wisata secara aman.

Ketiga, peran pemerintah daerah sebagai koordinator lintas sektor telah mendorong terjalinnya kerja sama antara Dinas Pariwisata, BPBD, pemerintah kelurahan, dan Pokdarwis. Koordinasi ini mendukung proses transfer pengetahuan kebencanaan dan penanganan awal terhadap potensi bencana. Akan tetapi, koordinasi yang ada masih

bersifat insidental dan belum terlembaga dalam mekanisme kerja sama yang berkelanjutan, sehingga efektivitas implementasi kebijakan sangat bergantung pada kegiatan atau momentum tertentu.

Secara keseluruhan, implementasi kebijakan kesiapsiagaan bencana pada Destinasi Wisata Air Hitam Kota Palangka Raya telah meningkatkan kapasitas dan kesiapsiagaan Pokdarwis sebagai pengelola destinasi wisata. Namun, untuk mencapai kesiapsiagaan yang komprehensif dan berkelanjutan, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan dukungan sumber daya, serta integrasi kebijakan kesiapsiagaan bencana ke dalam tata kelola pariwisata daerah secara lebih sistematis.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka saran yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Saran bagi Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah disarankan untuk menyusun dan menetapkan regulasi teknis serta standar operasional prosedur (SOP) kesiapsiagaan bencana yang spesifik bagi destinasi wisata berbasis alam, khususnya Destinasi Wisata Air Hitam. Selain itu, perlu adanya penguatan koordinasi lintas sektor melalui pembentukan forum atau tim kerja tetap yang melibatkan OPD terkait, BPBD, pemerintah kelurahan, dan Pokdarwis. Pemerintah daerah juga perlu memastikan keberlanjutan program peningkatan kapasitas melalui alokasi anggaran yang memadai dan pendampingan berkelanjutan.

### 2. Saran bagi Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)

Pokdarwis diharapkan dapat meningkatkan komitmen internal dalam menerapkan prinsip kesiapsiagaan bencana secara konsisten. Pokdarwis perlu menyusun pembagian peran yang jelas dalam situasi darurat, melakukan pemeliharaan sarana keselamatan secara berkala, serta mengintegrasikan edukasi keselamatan kepada wisatawan sebagai bagian dari pelayanan wisata. Selain itu,

Pokdarwis perlu proaktif menjalin komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya.

### 3. Saran bagi Pemangku Kepentingan Lain

Pemangku kepentingan seperti pemerintah kelurahan, relawan kebencanaan, dan masyarakat sekitar destinasi wisata diharapkan dapat berperan aktif dalam mendukung implementasi kebijakan kesiapsiagaan bencana. Keterlibatan multipihak diperlukan untuk membangun sistem kesiapsiagaan yang bersifat kolaboratif dan berkelanjutan.

### 4. Saran bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian dengan pendekatan kuantitatif atau mixed methods guna mengukur tingkat kesiapsiagaan bencana secara lebih objektif. Selain itu, penelitian komparatif antar destinasi wisata berbasis alam di wilayah lain juga diperlukan untuk memperoleh gambaran yang lebih luas mengenai implementasi kebijakan kesiapsiagaan bencana di sektor pariwisata.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2020). *Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana*. Jakarta: BNPB.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2021). *Rencana Nasional Penanggulangan Bencana*. Jakarta: BNPB.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Dunn, W. N. (2018). *Public Policy Analysis* (6th ed.). New York: Routledge.
- Grindle, M. S. (2017). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princeton: Princeton University Press.
- Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). *Implementation and Public Policy*. Glenview: Scott, Foresman and Company.
- Morgan, P. (2006). *The Concept of Capacity*. Maastricht: European Centre for Development Policy Management (ECDPM).
- Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan  
Bencana.

United Nations World Tourism Organization. (2019). Tourism and Disaster Risk Reduction.  
Madrid: UNWTO.

Wisner, B., Blaikie, P., Cannon, T., & Davis, I. (2014). At Risk: Natural Hazards, People's  
Vulnerability and Disasters. London: Routledge.